

EVALUASI KEBERHASILAN REALISASI DANA BOS SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Rediyanto Putra

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
email: rediyantoputra@unesa.ac.id

ABSTRACT

The education budget, which has a huge amount in 2020, is dominated by the Budget for Operational Assistance (BOS) funds. Therefore, this school operational assistance fund budget must be followed with optimal results. This paper aims to provide empirical evidence regarding the impact of the realization of BOS funds on the quality of education and HDI in Indonesia. This research was conducted in 33 provinces in Indonesia for the 2018-2019 period. The data in this study were obtained from data published by the Directorate General of Fiscal Balance and the Central Bureau of Statistics. Further research data were analyzed using path analysis through the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 22.0 program. The results of the test show that the realization of BOS funds is proven to have a positive impact on increasing average school time so that it has an impact on increasing the Human Development Index. However, the test results have not been able to prove that the realization of BOS funds was able to significantly reduce the level of illiteracy in Indonesia. The significance that can be taken from the test results is (1) the realization of BOS funds has succeeded in improving the quality of education in Indonesia, however (2) the percentage of the total cost of BOS funds in the education budget needs to be readjusted with the other total education costs. Based on this, it is necessary to maximize the education budget postures.

Keywords: HDI, illiteracy, school operational assistance funds, the average length of school time

ABSTRAK

Anggaran pendidikan yang memiliki jumlah sangat besar pada tahun 2020 didominasi oleh anggaran untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, anggaran dana BOS ini harus diikuti dengan hasil yang optimal. Tulisan memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak dari realisasi dana BOS terhadap kualitas pendidikan serta IPM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi yang ada di Indonesia untuk periode tahun 2018-2019. Data pada penelitian ini diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan path analysis melalui program SPSS versi 22.0. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa realisasi dana BOS terbukti memiliki dampak positif dalam menambah rata-rata lama waktu sekolah sehingga berdampak terhadap peningkatan IPM. Namun, hasil pengujian belum dapat membuktikan bahwa realisasi dana BOS mampu mengurangi secara signifikan tingkat buta huruf di Indonesia. Arti penting yang dapat diambil dari hasil pengujian adalah (1) realisasi dana BOS telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun (2) persentase jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan jumlah biaya pendidikan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada pemaksimalan kembali postur anggaran pendidikan yang dapat dilakukan dengan cara yaitu penyesuaian atau peningkatan anggaran KIP, dana untuk bangun rehab kelas dan fasilitas/sarpras, serta bantuan hibah untuk pelaksanaan program buta huruf yang melibatkan berbagai pihak.

Kata Kunci: IPM, buta huruf, dana bantuan operasional sekolah, rata-rata lama waktu sekolah.

1 PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang penting karena pendidikan akan menentukan kualitas diri setiap warga negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*”. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia wajib untuk menempuh pendidikan dalam kehidupannya agar dapat menjadi manusia yang berkualitas.

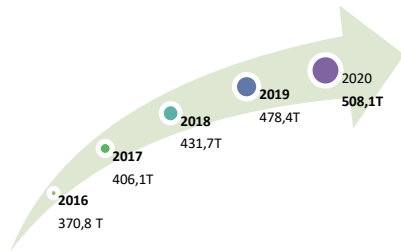
Pendidikan menjadi suatu hal yang penting karena pendidikan dapat menentukan kualitas dari suatu masyarakat sebagai *human capital*. Manusia sebagai *human capital* memerlukan pengetahuan, *skill*, sikap, kesehatan, dan sifat (Rastogi, 2002). Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki manusia agar dapat menjadi *human capital* yang baik diperoleh selama kegiatan pendidikan wajib (Alan et al., 2008). Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan *human capital* yang baik. Frank & Bernanke (2007) menyatakan bahwa gabungan dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang dapat memengaruhi produktivitas manusia. Tingkat produktivitas yang tinggi dari masing-masing *human capital* pada akhirnya dapat menciptakan perekonomian yang lebih baik dari suatu negara. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Romer (1990) bahwa *human capital* adalah sumber dasar dari suatu produktivitas ekonomi.

Kualitas dari *human capital* dapat diukur dengan menggunakan dasar kualitas pendidikan dan kesehatan. Secara aplikatif ukuran kualitas pendidikan seseorang dapat ditentukan dari dua komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama waktu sekolah (Nurkholis, 2018). Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018) menjelaskan bahwa dana BOS adalah program dari pemerintah yang digunakan untuk menyediakan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan demikian, adanya dana BOS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penurunan jumlah buta huruf dan meningkatkan rata-rata lama waktu sekolah.

Kualitas pendidikan yang ada di Indonesia sekarang belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan peringkat pendidikan Indonesia di lingkup Asia Tenggara masih belum termasuk dalam 100 negara teratas dan masih kalah dengan 4 negara Asia tenggara lainnya yang telah masuk ke dalam 100 negara terbaik pada kualitas pendidikan.. Sahroji (2017) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia berada di peringkat 108 di dunia dan ke-5 di Asia Tenggara dan masih berada di bawah negara Singapura (peringkat ke-9 dunia dan ke-1 di Asia Tenggara), Brunei Darussalam (peringkat ke-30 dunia dan ke-2 di Asia Tenggara), Malaysia (peringkat ke-62 dunia dan ke-3 di Asia Tenggara), dan Thailand (peringkat ke-89 dunia dan ke-4 di Asia Tenggara). Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah seharusnya Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyediaan anggaran

yang mendukung proses pendidikan agar berjalan dengan baik dan maksimal.

Setiap tahun, Pemerintah Indonesia berupaya keras meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan menyediakan anggaran pendidikan yang sangat tinggi yaitu 20 persen dari APBN Indonesia. Gambar 1 menyajikan anggaran pendidikan tahun 2016-2020.



Sumber: [Kementerian Keuangan, 2020](#).

Gambar 1. Anggaran Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 anggaran pendidikan Indonesia mencapai 508,1 Triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan dan infrastruktur, anggaran pendidikan termasuk dalam anggaran yang besar, di mana anggaran kesehatan dan infrastruktur Indonesia tahun 2020 masing-masing hanya sekitar Rp132,2 triliun dan Rp423,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Oleh karena itu, pada kondisi ini muncul pertanyaan apakah anggaran pendidikan yang besar ini dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Anggaran pendidikan yang memiliki jumlah sangat besar pada tahun 2020 didominasi oleh anggaran untuk dana BOS. yaitu sebesar Rp64 triliun atau 12,60 persen dari seluruh anggaran pendidikan yang ditujukan untuk 54,8 juta siswa di 271 ribu sekolah umum/madrasah yang ada di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Oleh karena itu, adanya dana BOS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat SD-SMA.

Dana BOS adalah program pemerintah yang digunakan untuk menyediakan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar mulai jenjang SD-SMA (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Penggunaan dana BOS untuk jenjang SD-SMA antara lain seperti pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan, serta pembelian fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, sekolah diharapkan memiliki kemampuan keuangan dan kelengkapan fasilitas penunjang yang baik, sehingga akan mempermudah pelaksanaan kegiatan belajar yang baik dan meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan. Selain itu, dengan adanya dana BOS diharapkan jumlah angka buta huruf dapat berkurang dan rata-rata lama waktu sekolah masyarakat menjadi meningkat untuk mewujudkan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Beberapa penelitian telah membuktikan adanya dampak dana BOS terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Akbar et al. (2018), Husein (2017), dan Kharisma (2013) telah membuktikan adanya dampak positif dari dana BOS. Artinya, dana BOS telah mampu meningkatkan kemampuan sekolah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik mulai dari SD sampai SMA, sehingga mampu menurunkan jumlah angka putus sekolah. Kharisma (2013) menjelaskan bahwa dana BOS belum memberikan pengaruh positif terhadap siswa usia 7-15 tahun dan lebih berpengaruh terhadap siswa usia 16-20 tahun. Namun, hasil penelitian dari Akbar et al. (2018) memiliki hasil yang berbeda yang menjelaskan bahwa program pemberian dana BOS pada SD terutama di Kabupaten

Mamuju sudah memenuhi aspek-aspek dan tujuan utama seperti yang diatur dalam buku petunjuk teknis dana BOS dengan ditandai tidak adanya laporan pungutan yang diperoleh dari orang tua siswa dan sekolah. Selanjutnya, Husein (2017) menjelaskan bahwa dana BOS juga telah mampu memperkuat kemampuan sekolah untuk memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan pada siswa dalam peningkatan kualitas pendidikan.

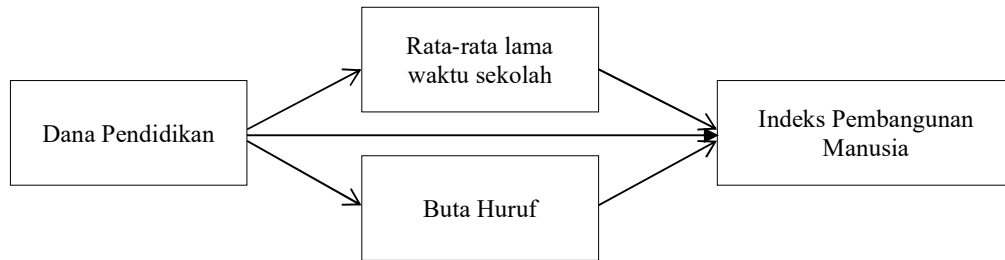
Secara umum, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif dari dana BOS yang secara jelas menggambarkan bahwa dana BOS akan berdampak terhadap kualitas pendidikan dengan penekanan pada pengurangan buta huruf dan peningkatan rata-rata lama waktu sekolah/belajar. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan memperkuat argumen tersebut yang berangkat dari teori *human capital* yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menghubungkan dampak peningkatan kualitas pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada teori *human development*. UNDP (1990) menjelaskan bahwa *human development* adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Pembangunan manusia dapat diukur dengan menggunakan *Human Development Index* atau IPM. Komponen dari indeks ini adalah indeks harapan hidup, indeks hidup layak, dan indeks pendidikan (Nurkholis, 2018). Hal ini sejalan dengan pengukuran IPM oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada laporan *Human Development Report* pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (UNDP, 1990).

Agustina et al. (2016) dan Sidabutar et al. (2020) telah melakukan pengujian

untuk mengetahui pengaruh dana pendidikan terhadap IPM, namun memiliki hasil yang berbeda. Agustina et al. (2016) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan Sidabutar et al. (2020) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan penjelasan dari landasan teori yang telah dijelaskan dan diperkuat dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan diuji 7 hipotesis. Adapun ketujuh hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1: Realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh positif terhadap rata-rata lama waktu sekolah
- H2: Realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh negatif terhadap tingkat buta huruf
- H3: Realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap IPM
- H4: Rata-rata lama waktu sekolah berpengaruh positif terhadap IPM
- H5: Tingkat buta huruf berpengaruh negatif terhadap IPM
- H6: Realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap IPM melalui peningkatan rata-rata lama waktu sekolah
- H7: Realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap IPM melalui penurunan buta huruf



Gambar 2. Model Penelitian

Paragraf sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai adanya dugaan bahwa dana BOS memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pembuktian terkait hal tersebut pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya dampak realisasi dana BOS terhadap tingkat buta huruf dan rata-rata lama waktu sekolah di Indonesia dengan berdasarkan pada teori *human capital* dan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, keterbaruan pada penelitian ini adalah membuktikan ada atau tidaknya dampak dari realisasi dana BOS baik secara langsung maupun tidak terhadap IPM. Hal ini dikarenakan pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan adanya dampak tidak langsung dari dana BOS terhadap peningkatan IPM. Madudy & Aulia (2018) merupakan peneliti yang sebelumnya melakukan penelitian terkait dampak IPM terhadap pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas pengajar, kemiskinan, dan IPM memengaruhi secara positif terhadap efisiensi pengelolaan dana BOS. Namun, hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan cakupan sekolah terhadap efisiensi dana BOS.

Hasil dari penelitian ini akan memberikan beberapa kontribusi, baik secara akademis dan kebijakan. Secara akademis, hasil dari penelitian ini akan memberikan penguatan bukti empiris terkait penjelasan dari teori *human capital*

dan *human development* serta menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan tema yang sejenis. Sedangkan kontribusi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan rujukan evaluasi untuk memaksimalkan penggunaan dana BOS di Indonesia.

2 METODE

2.1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab masalah yang dibahas. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan filsafat positivisme untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan analisis statistik terhadap hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Hipotesis yang disusun pada penelitian ini adalah sebanyak 7 (tujuh) hipotesis yang dikembangkan dari *human capital theory* dan *human development theory* serta hasil penelitian terkait. Hipotesis pada penelitian ini menguji adanya pengaruh secara langsung dari tingkat realisasi pengelolaan dana BOS terhadap rata-rata lama waktu sekolah, tingkat buta huruf, serta menguji pengaruh tidak langsung dari tingkat realisasi pengelolaan dana BOS terhadap IPM.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang berasal dari DJPK Kementerian Keuangan

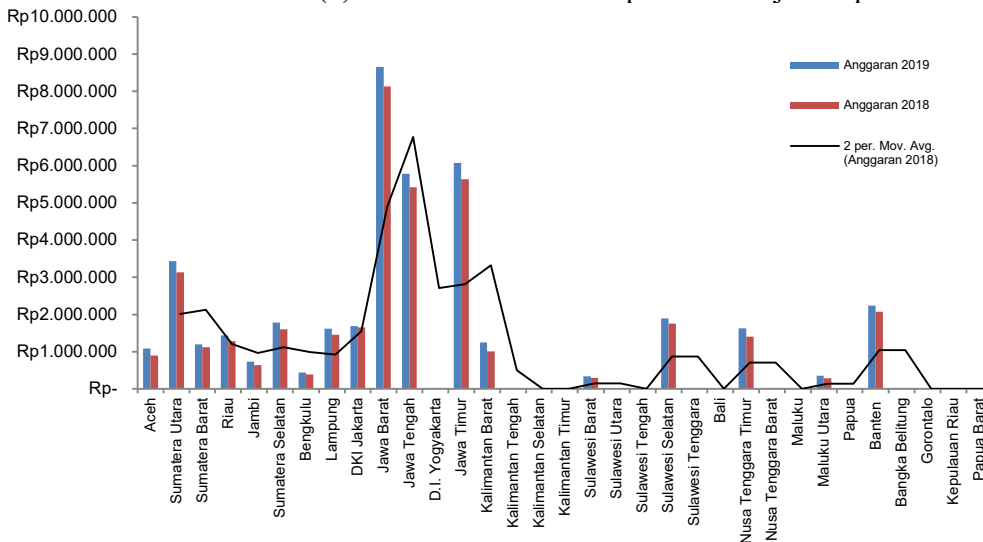
RI adalah data terkait dana BOS pemerintah provinsi tahun 2018-2019. Selanjutnya, data dari BPS adalah data rata-rata lama waktu sekolah masyarakat, tingkat buta huruf, dan IPM tahun 2018-2019. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

2.3. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Metode statistik yang digunakan yaitu uji *path analysis*. Uji *path analysis* digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh realisasi pengelolaan dana pendidikan terhadap rata-rata lama waktu sekolah, buta huruf, dan IPM. *Path analysis* digunakan karena pada penelitian ini akan melakukan pengujian pengaruh langsung dana BOS terhadap kualitas pendidikan (rata-rata lama waktu sekolah dan buta huruf) serta menguji pengaruh tidak langsung dari dana BOS terhadap IPM. Proses analisis data menggunakan program aplikasi SPSS versi 22.0. Bentuk persamaan *path analysis* pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Hakam et al., 2015):

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

.....
 (1)



Sumber: data diolah, 2020. **Gambar 3.** Anggaran Dana BOS Tahun 2018-2019 (Jutaan)

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

.....
 (2)

$$Z = \alpha + \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_2 + \varepsilon$$

.....
 (3)

Keterangan:

- X₁ : Realisasi dana BOS (persentase)
- Y₁ : Rata-rata lama waktu sekolah (tahun)
- Y₂ : Buta huruf (persentase)
- Z : IPM (persentase)
- α : Konstanta
- β : Koefisien
- ε : Error

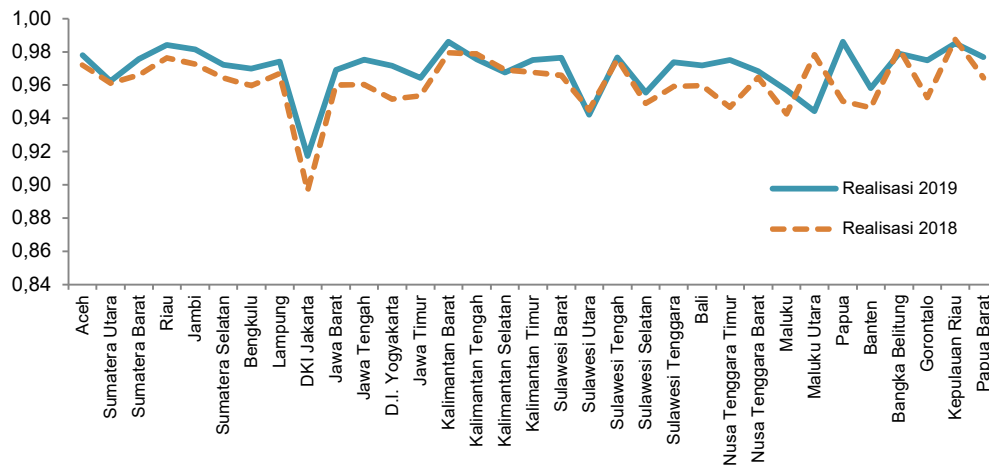
3 HASIL ANALISIS

3.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Data pada penelitian ini dikumpulkan dari proses sampling pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil proses sampling yang telah dilakukan, terdapat satu provinsi yang tidak dapat digunakan karena tidak menyediakan data dana BOS pada tahun 2018, yaitu Provinsi Sulawesi Barat beserta dengan seluruh kabupaten/kota yang terdapat pada provinsi tersebut. Dengan demikian, pada penelitian ini hanya digunakan data 33 provinsi untuk tahun 2018 dan 2019. Gambaran lebih lengkap terkait data yang telah dikumpulkan disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan bahwa setiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan anggaran dana BOS dari tahun 2018-2019. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan jumlah anggaran dana BOS terendah dengan total anggaran sebesar Rp220 juta pada tahun 2018 dan Rp264 juta pada tahun 2019, sedangkan Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah anggaran dana

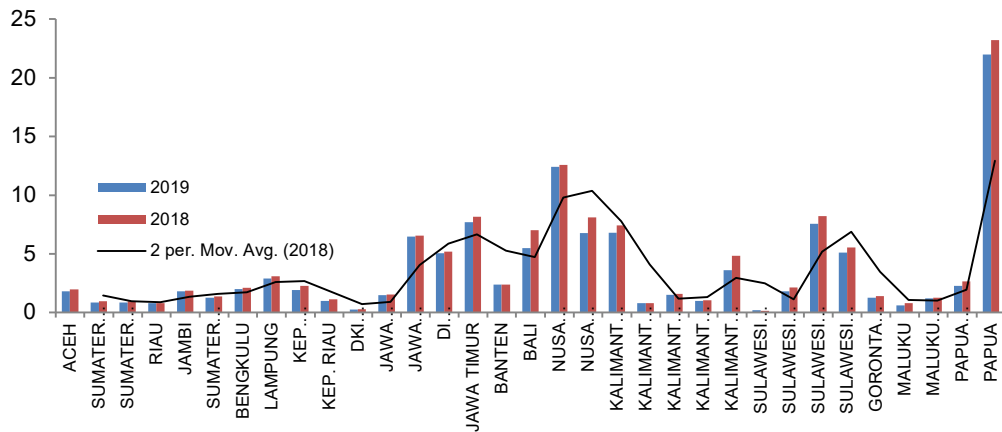
BOS tertinggi yaitu Rp8,1 triliun pada tahun 2018 dan Rp8,65 triliun pada tahun 2019. Namun, peningkatan anggaran dana BOS dari Provinsi Papua Barat lebih tinggi, yaitu 20,2 persen, sedangkan peningkatan anggaran dan BOS di Provinsi Jawa Barat hanya 6,4 persen. Gambar 4 menggambarkan realisasi dari anggaran pada 33 provinsi di Indonesia untuk tahun 2018 dan 2019



Sumber: data diolah, 2020. **Gambar 4.** Persentase Realisasi Dana BOS Tahun 2018-2019 (Persen)

Gambar 4 menunjukkan tingkat penggunaan anggaran dana BOS di 33 provinsi di Indonesia tahun 2018-2019. Secara keseluruhan rata-rata realisasi anggaran dana BOS pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 91,70 persen dan pada tahun 2019 adalah sebesar 97 persen. Pada tahun 2018, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan tingkat realisasi anggaran dana BOS yang tertinggi, yaitu 99 persen,

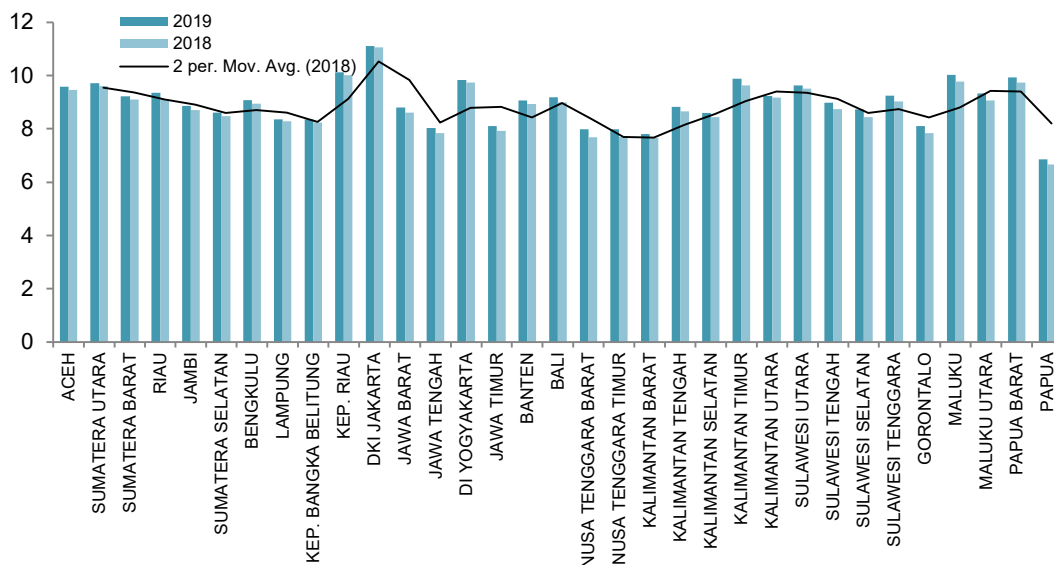
sedangkan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat realisasi anggaran dana BOS terendah, yaitu 90 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat realisasi anggaran dana BOS yang tertinggi yaitu 99 persen, sedangkan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat realisasi anggaran dana BOS terendah, yaitu 92 persen.



Sumber: data diolah, 2020. **Gambar 5.** Persentase Buta Huruf Tahun 2018-2019 (Persen)

Gambar 5 menunjukkan jumlah persentase buta huruf untuk setiap penduduk dengan usia di atas 15 tahun pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2019. Secara keseluruhan, rata-rata persentase buta huruf penduduk usia di atas 15 tahun pada setiap provinsi adalah 3,9 persen untuk tahun 2018 dan 3,6 persen untuk tahun 2019. Jumlah persentase buta huruf paling sedikit adalah berada pada Provinsi Sulawesi Utara pada

tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 0,13 persen dan 0,2 persen. Selanjutnya, jumlah persentase buta huruf paling banyak adalah berada pada Provinsi Papua yaitu 23,2 persen pada tahun 2018 dan 22 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pada Provinsi Papua harus ditingkatkan lagi karena jumlah persentase buta huruf penduduk usia di atas 15 tahun yang dimiliki termasuk pada kategori tinggi.



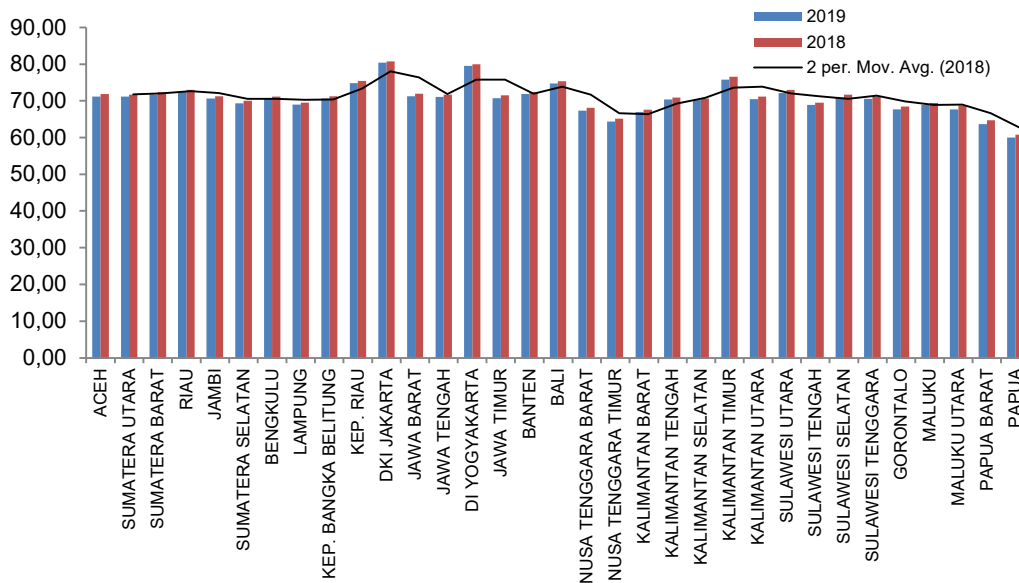
Sumber: data diolah, 2020. **Gambar 6.** Rata-Rata Lama Waktu Sekolah Tahun 2018-2019 (Tahun)

Gambar 6 menunjukkan rata-rata lama waktu sekolah masyarakat pada 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2018-2019. Secara keseluruhan, rata-rata lama waktu sekolah masyarakat pada setiap

provinsi adalah 8,9 tahun untuk tahun 2018 dan 8,8 tahun untuk tahun 2019. Dengan demikian, rata-rata lama waktu sekolah masyarakat pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 bisa

dikatakan hampir memenuhi tujuan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Masyarakat pada Provinsi Papua pada tahun 2018 dan 2019 memiliki rata-rata lama waktu sekolah yang paling rendah yaitu 6,7 tahun dan 6,9 tahun. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu sekolah masyarakat pada Provinsi Papua masih jauh dengan standar rata-rata lama waktu sekolah minimal yang seharusnya adalah 9 tahun. Selanjutnya, masyarakat pada Provinsi

DKI Jakarta pada tahun 2018 dan 2019 memiliki rata-rata lama waktu sekolah yang paling tinggi yaitu 11,1 tahun dan 11,1 tahun. Dengan demikian, rata-rata lama waktu sekolah pada Provinsi DKI Jakarta sudah melebihi Program Wajib Belajar 9 Tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan yang sangat menonjol terkait rata-rata lama waktu sekolah yang ditempuh oleh masyarakat di Indonesia.



Sumber: data diolah, 2020. **Gambar 7.** Persentase IPM Tahun 2018-2019 (Persen)

Gambar 7 menunjukkan IPM pada 33 Provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, rata-rata IPM pada setiap provinsi adalah 70,50 persen untuk tahun 2018 dan 71,2 persen untuk tahun 2019. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan IPM di Indonesia dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selain itu, IPM di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 termasuk pada kategori cukup. Masyarakat pada Provinsi Papua pada tahun 2018 dan 2019 memiliki IPM yang paling rendah yaitu 60,60 persen dan 60,80 persen. Hal ini menunjukkan tingkat IPM pada Provinsi Papua untuk tahun 2018 dan 2019 termasuk pada kategori buruk.

Selanjutnya, masyarakat pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 dan 2019 memiliki IPM yang paling tinggi, yaitu 80,50 persen dan 80,80 persen. Dengan demikian, hal ini menunjukkan tingkat IPM pada Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 dan 2019 termasuk pada kategori baik.

3.2. Hasil Analisis Data

Bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0. Uji yang pertama kali dilakukan adalah uji normalitas data yang bertujuan untuk mengetahui sebaran data

yang telah dikumpulkan apakah memiliki distribusi yang normal atau tidak. Tabel 1 menyajikan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

			<i>Unstandardized Residual</i>
Jumlah Sampel (N)			66
Normal Parameter			
	<i>Mean</i>		0,00
	<i>Std. Deviation</i>		0,01
<i>Most Differences</i>	<i>Extreme Absolute</i>		0,10
	Positif		0,08
	Negatif		-
			0,09
<i>Test Statistic</i>			0,09
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>			0,20

Sumber: Hasil *output* SPSS.

Tabel 1 menunjukkan bahwa total jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian normalitas adalah sebanyak 66 observasi. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, distribusi dari data bersifat normal. Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,2 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, distribusi data bersifat normal. Pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah pengujian autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

No.	Bentuk Persamaan	Nilai DW
1.	$X_1 \rightarrow Y_1$	1,84
2.	$X_1 \rightarrow Y_2$	1,74
3.	$X_1 \rightarrow Z$	1,71
4.	$Y_1 + Y_2 \rightarrow Z$	1,85

Sumber: Hasil *output* SPSS.

Tabel 2 menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) yang akan digunakan sebagai dasar penentuan terjadi atau tidak gejala autokorelasi. Gejala autokorelasi tidak terjadi jika nilai DW lebih besar dari nilai $4 - D_U$ dan kurang dari $4 - D_L$. Pada penelitian ini nilai D_U yang digunakan adalah $k=1$, $n=66$ untuk persamaan uji pengaruh langsung dana BOS terhadap rata-rata lama waktu sekolah dan buta huruf no. 1-3 yaitu 1,6318; dan $k=2$, $n=66$ untuk persamaan pengaruh tidak langsung dari dana BOS terhadap IPM melalui rata-

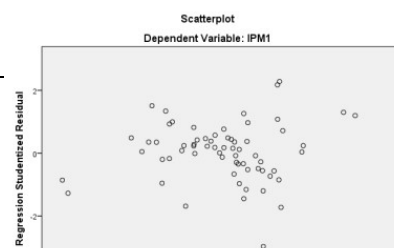
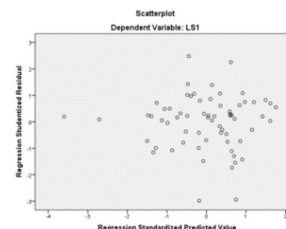
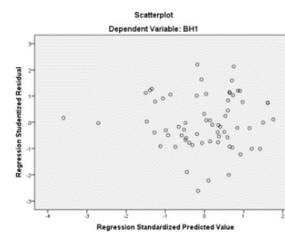
rata lama waktu sekolah dan buta huruf no. 4 yaitu 1,6440. Berdasarkan nilai DW yang dihasilkan pada pengujian autokorelasi, ditunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada seluruh persamaan.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai VIF	Nilai <i>Tolerance</i>
BOS	1,20	0,80
Rata-rata lama waktu sekolah	2,20	0,50
Buta Huruf (BH)	2,01	0,40

Sumber: Hasil *output* SPSS.

Pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah pengujian multikolinieritas yang disajikan hasilnya pada Tabel 3. Persamaan regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas jika nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 untuk masing-masing variabel independen menandakan bahwa telah terjadi gejala multikolinieritas pada persamaan regresi. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel dana BOS, rata-rata lama waktu sekolah, dan buta huruf memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi ini terbebas dari gejala multikolinieritas.



Nilai R^2 untuk persamaan 1, 2, dan 3 kecil disebabkan jumlah variabel independen pada penelitian ini hanya 1, yaitu dana BOS.

Gambar 8. Hasil Uji *Heteroskedastisitas* (Output SPSS)

Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji *heteroskedastisitas*. Uji ini dilakukan dengan melihat gambar dari *scatterplot* yang sudah dihasilkan dari *output* SPSS pada Gambar 8. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas* pada keempat model persamaan regresi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk titik-titik pada *scatterplot* yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji asumsi klasik secara keseluruhan maka bentuk persamaan regresi pada penelitian ini telah memenuhi kaidah *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

Tabel 4. R^2

Bentuk Persamaan	R^2
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,01
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,05
$X_1 \rightarrow Z$	0,01
$Y_1 + Y_2 \rightarrow Z$	0,40

Sumber: Hasil *output* SPSS.

Pengujian selanjutnya setelah asumsi klasik adalah pengujian terkait nilai koefisien determinasi. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan penjelas dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel X_1 yaitu dana BOS memiliki kemampuan penjelas terhadap variabel Y_1 , Y_2 , dan Z yaitu tingkat buta huruf, rata-rata lama waktu sekolah, dan IPM adalah sebesar 1,40 persen; 5 persen; 1,40 persen sedangkan sisanya adalah dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan pada persamaan regresi pada penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	Signifikansi	Benchmark
H1	6,85	0,02*	0,05
H2	0,085	0,29	0,05
H3	0,026	0,05*	0,05
H4	0,725	0,00*	0,05
H5	0,0025	0,18	0,05
H6	0,032	0,00*	0,05
H7	Tidak bisa diuji		

Keterangan: *) Signifikan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Sumber: Hasil *output* SPSS.

Tabel 5 menunjukkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, di mana nilai koefisien yang positif menunjukkan terjadi pengaruh yang positif, sedangkan jika nilai koefisien bernilai negatif menunjukkan pengaruh yang negatif. Selanjutnya, nilai signifikansi kurang dari 0,05 (5 persen) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (5 persen) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Tabel 6 menunjukkan bahwa dari ketujuh hipotesis yang telah dikembangkan berdasarkan *human capital theory*, *human development theory*, dan beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat 4 hipotesis yang diterima dan 3 hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang diterima pada penelitian ini adalah hipotesis H1, H3, H4, dan H6. Selanjutnya hipotesis yang ditolak pada penelitian ini adalah H2, H5, dan H7.

Hipotesis pertama diterima didasarkan pada nilai koefisien sebesar 6,85 dan nilai signifikansi sebesar 0,02 dari uji hipotesis yang telah dilakukan. Hasil ini menandakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen dari realisasi dana BOS akan menyebabkan perubahan nilai sebesar 6,85 persen pada rata-rata lama waktu sekolah. Dengan demikian, realisasi dana BOS terbukti berpengaruh positif terhadap rata-rata lama waktu sekolah di Indonesia.

Hipotesis kedua pada penelitian ini tidak menemukan bukti empiris adanya pengaruh negatif dari realisasi dana BOS terhadap tingkat buta huruf di Indonesia. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien sebesar 0,085 dan nilai signifikansi sebesar 0,29 yang lebih besar dari 0,05 dari uji hipotesis yang telah dilakukan.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari realisasi dana BOS terhadap IPM di Indonesia. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien sebesar 0,026 dan nilai signifikansi sebesar 0,05 dari uji hipotesis yang telah dilakukan. Dengan demikian, jika terjadi peningkatan 1 persen dari realisasi dana BOS, maka akan menyebabkan peningkatan nilai sebesar 0,026 persen dari IPM.

Hipotesis keempat pada penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari rata-rata lama waktu sekolah terhadap IPM di Indonesia. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien sebesar 0,725 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 dari uji hipotesis yang telah dilakukan. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen dari rata-rata lama waktu sekolah akan mengakibatkan kenaikan nilai sebesar 0,725 persen dari IPM.

Hipotesis kelima pada penelitian ini tidak berhasil mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari tingkat buta huruf terhadap IPM di Indonesia. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien sebesar 0,0025 dan nilai signifikansi sebesar 0,18 yang lebih besar dari 0,05 dari uji hipotesis yang telah dilakukan.

Hipotesis keenam pada penelitian ini berhasil membuktikan bahwa realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap IPM melalui peningkatan rata-rata lama waktu sekolah. Hal ini didasarkan pada perhitungan nilai koefisien dari hasil uji analisis jalur yang telah dilakukan. Nilai koefisien analisis jalur yang dihasilkan adalah sebesar 0,032,

di mana nilai koefisien ini lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien pengaruh langsung dari realisasi dana BOS terhadap IPM sebesar 0,026.

Hipotesis ketujuh pada penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa realisasi pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap IPM melalui penurunan buta huruf. Hal ini dikarenakan variabel realisasi dana BOS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat buta huruf dan variabel tingkat buta huruf juga tidak berpengaruh terhadap IPM. Oleh karena itu, pengujian mediasi tidak bisa dilakukan, sehingga secara otomatis hipotesis ketujuh ditolak.

3.3. Pembahasan Pengaruh Realisasi Dana BOS pada Kualitas Pendidikan Melalui Peningkatan Rata-rata Lama Waktu sekolah dan Penurunan Tingkat Buta Huruf

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini pada dasarnya memberikan arti penting bagi anggaran pendidikan di Indonesia. Arti penting yang dapat diambil dari hasil pengujian adalah (1) realisasi dana BOS telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun (2) persentase jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan jumlah biaya pendidikan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada dua alasan sesuai hasil pengujian pada penelitian ini.

Dana BOS telah dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bukti empiris bahwa realisasi dana BOS mampu memengaruhi secara positif terhadap rata-rata lama waktu sekolah dan IPM. Adanya pengaruh positif dari realisasi dana BOS terhadap rata-rata lama waktu sekolah ditunjukkan dari diterimanya hipotesis H1, H3, H4, dan H6. Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan tujuan dari dana BOS, penjelasan *human capital theory*, dan *human development theory*. Rastogi (2002) menjelaskan bahwa *human*

capital merupakan suatu pengetahuan, *skill*, sikap, kesehatan, dan sifat dari setiap manusia. Frank & Bernanke (2007) juga menyatakan bahwa *human capital* merupakan gabungan dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang dapat memengaruhi produktivitas manusia. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan *human capital* yang baik. Secara aplikatif ukuran kualitas pendidikan seseorang dapat ditentukan dari dua komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama waktu sekolah (Nurkholis, 2018). Berdasarkan bukti empiris yang ditemukan pada penelitian ini dan dukungan dari penjelasan human capital theory dan development theory serta beberapa hasil penelitian terdahulu, maka pemerintah sudah seharusnya untuk berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui dana BOS. Hal ini disebabkan pada akhirnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut akan mampu mempercepat proses pembangunan manusia. Keberhasilan atau tidaknya pengembangan manusia di Indonesia dapat diukur dengan menggunakan Human Development Index atau dalam Indonesia lebih dikenal dengan IPM. Komponen dari indeks ini adalah indeks harapan hidup, indeks hidup layak, dan indeks pendidikan (Nurkholis, 2018).

Tujuan dari dana BOS di Indonesia adalah untuk menciptakan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu. Tujuan tersebut dicapai melalui penggunaan dana BOS yang digunakan untuk melakukan pembebasan pungutan bagi peserta didik terhadap biaya operasi sekolah dan pembebasan seluruh pungutan biaya peserta didik miskin dalam bentuk apapun. Dengan demikian, seluruh peserta didik mulai dari tingkat SD sampai SMA bisa terus bersekolah tanpa adanya terkendala dalam hal biaya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan tercapainya Program Wajib Belajar 9 Tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Rata-

rata lama waktu sekolah yang tinggi ini sudah mampu memenuhi salah satu syarat terciptanya pendidikan yang berkualitas. Secara aplikatif ukuran kualitas pendidikan dapat ditentukan dari dua komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama waktu sekolah (Nurkholis, 2018). Dengan demikian, program dana BOS di Indonesia harus terus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

Alasan persentase jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan jumlah biaya pendidikan yang lainnya adalah didasarkan pada ditolaknya hipotesis H2, H5, dan H7 pada penelitian ini. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dana BOS dari pemerintah belum bisa memenuhi kriteria peningkatan kualitas pendidikan didasarkan pada *human capital theory*. Nurkholis (2018) menjelaskan bahwa pendidikan yang berkualitas ditentukan dari angka melek huruf dan rata-rata lama waktu sekolah. Hasil pengujian pada penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif dari realisasi dana BOS terhadap tingkat buta huruf di Indonesia. Dengan demikian, adanya realisasi dana BOS belum bisa memenuhi syarat kedua untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa didasarkan pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa ketidakmampuan dana BOS untuk mengurangi tingkat buta huruf di Indonesia secara signifikan dapat disebabkan karena adanya pengaruh dari faktor lain, sehingga adanya realisasi dana BOS saja tidak cukup signifikan mengurangi jumlah tingkat buta huruf di Indonesia. Fereire (1999) menjelaskan terdapat beberapa penyebab tingginya tingkat buta huruf yaitu kondisi ekonomi, kesadaran terhadap pendidikan yang rendah, jumlah anggota keluarga yang banyak dan ketidakmampuan dalam menghadapi kehidupan sehingga menyebabkan terjadinya putus sekolah

atau tidak mampu sekolah yang pada akhirnya berdampak pada buta huruf. Dengan demikian, adanya realisasi dana BOS yang ada saat ini belum bisa secara signifikan menyelesaikan masalah-masalah penyebab terjadinya buta huruf.

Masalah buta huruf ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara merubah postur anggaran pendidikan dan menyesuaikan jumlah dana BOS agar lebih maksimal. Hal ini dikarenakan penyelesaian buta huruf dapat dilakukan dengan cara (1) mengurangi jumlah anak yang tidak sekolah; (2) membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran; (3) adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberantas buta

huruf; dan (4) perlu adanya keterlibatan berbagai pihak untuk pemberantasan buta huruf seperti ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Organisasi Masyarakat, kegiatan Kuliah Kerja Nyata, dan Program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Aksara (Syamsiah et al., 2016). Berdasarkan penyelesaian masalah buta huruf tersebut menunjukkan bahwa anggaran dana pendidikan saat ini yang mayoritas jumlah dana terbesar adalah untuk dana BOS belum mampu mencakup keempat poin penyelesaian buta huruf. Komposisi anggaran pendidikan tahun 2020 saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020. **Gambar 9.** Target Anggaran Pendidikan Tahun 2020

Gambar 9 menunjukkan target anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2020. Total anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp508,1 triliun atau 20 persen dari APBN Indonesia di tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.683,5 triliun. Gambar 8 tersebut memperlihatkan bahwa fokus target terbesar berada di dana BOS. Dana yang digunakan untuk kepentingan BOS adalah sebesar Rp64 triliun atau 12,60 persen dari

keseluruhan anggaran pendidikan tahun 2020. Namun, seharusnya pemerintah melakukan penyesuaian atau peningkatan anggaran pada biaya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang hanya 1,32 persen dari anggaran pendidikan tahun 2020 dengan tujuan untuk melakukan solusi pertama pemberantasan buta huruf yaitu mengurangi jumlah anak yang tidak sekolah. Selanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran dana untuk

melakukan rehab kelas dan fasilitas/sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang masih sebesar 1,57 persen dari anggaran pendidikan tahun 2020 untuk menciptakan proses pembelajaran yang nyaman sehingga minat masyarakat untuk bersekolah menjadi lebih tinggi. Adanya peningkatan anggaran dana untuk perbaikan dan penambahan sarpras, bangunan, dan fasilitas sekolah ini juga menunjukkan niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberantas buta huruf. Terakhir, perlu adanya penambahan anggaran dana bantuan hibah pada target anggaran pendidikan untuk pelaksanaan program buta huruf yang melibatkan pihak lain seperti hibah untuk program KKN mahasiswa atau program TNI Manunggal Aksara.

4 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak dari realisasi dana BOS terhadap kualitas pendidikan dan IPM di Indonesia. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa realisasi dana BOS terbukti memiliki dampak positif untuk meningkatkan rata-rata lama waktu sekolah yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan IPM. Namun, hasil pengujian belum dapat membuktikan bahwa realisasi dana BOS mampu mengurangi secara signifikan tingkat buta huruf di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga belum berhasil menemukan adanya pengaruh negatif dari buta huruf terhadap IPM. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum berhasil menemukan bukti bahwa adanya realisasi dana BOS dapat mengurangi tingkat buta huruf yang pada akhirnya dapat meningkatkan IPM di Indonesia.

Implikasi dari hasil penelitian pada dasarnya memberikan arti penting bagi anggaran pendidikan di Indonesia. Arti penting yang dapat diambil dari hasil pengujian adalah (1) realisasi dana BOS telah berhasil meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia, namun (2) persentase jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan jumlah biaya pendidikan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada dua alasan yang sesuai dengan hasil pengujian pada penelitian ini. Alasan pertama yaitu dana BOS telah dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia didasarkan dari ditemukannya bukti empiris bahwa realisasi dana BOS mampu memengaruhi secara positif terhadap rata-rata lama waktu sekolah dan IPM. Alasan kedua, persentase jumlah biaya dana BOS pada anggaran pendidikan perlu dilakukan penyesuaian kembali karena berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dana BOS dari pemerintah belum bisa memenuhi kriteria peningkatan kualitas pendidikan didasarkan pada *human capital theory*.

Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan perubahan terhadap postur anggaran pendidikan yang sudah ada. Adapun cara penyelesaian buta huruf dapat dilakukan dengan cara (1) mengurangi jumlah anak yang tidak sekolah, (2) membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran, (3) adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberantas buta huruf, dan (4) perlunya ada keterlibatan berbagai pihak untuk pemberantasan buta huruf seperti ibu-ibu PKK, Organisasi Masyarakat, kegiatan KKN, dan Program TNI Manunggal Aksara. Berdasarkan penyelesaian masalah buta huruf tersebut menunjukkan bahwa anggaran dana pendidikan saat ini yang mayoritas jumlah dana terbesar adalah untuk dana BOS belum mampu mencakup keempat poin penyelesaian buta huruf. Pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian atau peningkatan anggaran pada (1) biaya Kartu Indonesia Pintar, (2) anggaran dana untuk bangun rehab kelas dan fasilitas/sarpras pendidikan, (3) anggaran dana bantuan hibah pada target anggaran pendidikan untuk pelaksanaan

program buta huruf yang melibatkan pihak lain seperti hibah untuk program KKN mahasiswa atau program TNI Manunggal Aksara.

5 UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung untuk terselesaikannya artikel ini. Ucapan terima kasih yang pertama ditujukan kepada Universitas Negeri Surabaya yang selalu mendukung dalam hal kegiatan penelitian. Ucapan terima kasih kedua ditujukan kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

6 DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fereire, P. (1999). *Politik pendidikan, kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Frank, R.H., & Bernanke, B.S. (2007). *Principles of microeconomics* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- UNDP. (1990). *Human development report 1990*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

- Agustina, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(2), 192–217.
- Akbar, M. F., Suprpto, S. H., & Mohi, W. K. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Dan*

Pelayanan Publik, 2(1), 47–64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>.

- Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel, J. (2008). Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China: A Human Capital Development Approach. *Journal of European Industrial Training*, 32(1), 19–31.
- Hakam, M., Sudarno, & Hoyyi, A. (2015). Analisis Jalur Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Statistika UNDIP. *Jurnal Gaussian*, 4(1), 61–70. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.
- Husein, M. T. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah. *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan Rausyan Fikr*, 13(1), 1392–1407.
- Kharisma, B. (2013). Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 7–15. Retrieved from <http://researchgate.net/publication/253651362>.
- Madudy, I., & Aulia, A. (2018). Efisiensi Dana BOS Antar Provinsi di Indonesia: Apa Yang Memengaruhi? *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 220–335. <https://doi.org/doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.86>.
- Nurkholis, A. (2018). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory. *INA-Rxiv*, 8(7), 1–16. <https://doi.org/10.31227/osf.io/8trv7>.

- Rastogi, P. N. (2002). Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation. *Human Systems Management*, 21(4), 229–240.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), 71–102.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 86–101.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.376>.
- Syamsiah, Quraish, H., & Babo, R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf Syamsiah. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(1), 20–29.
- (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Website

- Kementerian Keuangan. (2020). APBN 2020. Diperoleh tanggal 20 Mei 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>.
- Sahroji, A. (2017). Daftar negara ASEAN dengan Peringkat pendidikan tertinggi. Diperoleh tanggal 20 Mei 2020, dari <https://news.okezone.com/read/2017/11/24/18/1820178/daftar-negara-asean-dengan-peringkat-pendidikan-tertinggi>.

Peraturan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.